

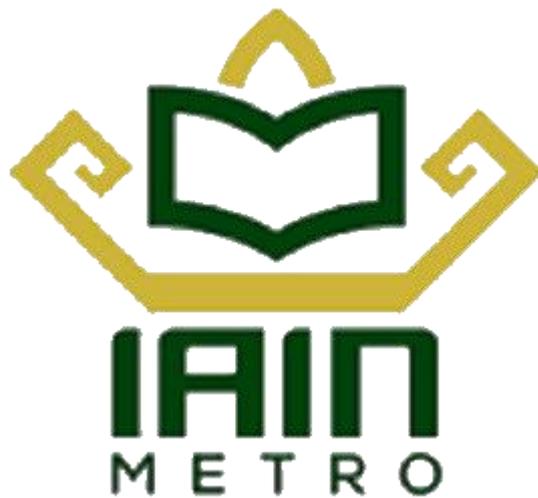
SKRIPSI

**ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA
TENTANG UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA:
PERSPEKTIF ISLAM**

Oleh:

RIDHO RAMA BISWARA

NPM. 1904010029



Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

1445 H/ 2023 M

ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA
TENTANG UNDANG -UNDANG CIPTA KERJA: PERSPEKTIF ISLAM

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna mendapatkan gelar
S.Sos.,

Oleh:

RIDHO RAMA BISWARA
NPM. 1904010029

Pembimbing : Dr. Umi Yawisah, M. Hum.

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1445 H/ 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TENTANG UU
CIPTAKER : PERSPEKTIF ISLAM
Nama : Ridho Rama Biswara
NPM : 1904010029
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 07 November 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Umi Yawisah, M. Hum.
NIP. 196204241999032001.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 47296, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Metro

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ridho Rama Biswara
NPM : 1904010029
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TENTANG UU
CIPTAKER : PERSPEKTIF ISLAM**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah untuk dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Ketua Jurusan KPI

GUADAMINAH Paminingsih, M.Sos.I
07702182000032001

Metro, 04 April 2023
Dosen Pembimbing


Dr. Umi Yawisah, M.Hum.
NIP. 196204241999032001



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725), Faksimil (0725) 47206; Website: www.iainmetro.ac.id; e-mail: iain@iainmetro.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor: B-0162/14.38-A/D/PP.004/02/2024

Skripsi dengan judul : ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TENTANG UU
CIPTAKER : PERSPEKTIF ISLAM disusun oleh : Ridho Rama Biswara Npm
1904010029, Jurusan: Komunikasi Dan Penyiaran Islam telah diujikan dalam
Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada hari / tanggal :

TIM PEMBAHAS :

Moderator : Dr. Umi Yawisah, M.Hum
Penguji I : Wawan Trans Pujiarto, M.Kom.I
Penguji II : Agam Anantama, M.I.Kom
Sekretaris : Budi Ariyanto, M.Sos


IAIN
METRO

Mengetahui

Dekan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Aguswan Kh Umam, S. Ag., MA
NIP. 1973080119990310

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TENTANG UU CIPTAKER PERSPEKTIF ISLAM

Oleh :
Ridho Rama Biswara
1904010029

Teknologi digital yang baru membawa Indonesia ke dua arah. Disatu sisi, digitalisasi membuat kaum oligarki mengontrol ranah media arus utama dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sekitar politik dan media. Pada saat yang sama juga, berbagai platform media digital digunakan oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan aktivisme dan pembebasan, dan warga biasa dapat menantang struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital yang efektif. Dan dijadikan alat untuk pembebasan sejatinya media tidak akan pernah lepas dalam ikut andil perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan media sebagai pengaruh dalam bermasyarakat khususnya pada peraturan UU Cipta Kerja kali ini

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis beberapa judul pemberitaan pada beberapa portal berita dengan literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, mengambil dari berbagai sumber dan literatur untuk mendeskripsikan pengaruh pemberitaan media tentang UU Ciptaker tentunya dengan perspektif islam.

Dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini juga ada yang pro dan kontra ini adalah cerminan akan ada sebuah pilihan dari berbagai faktor, dan sebagai seorang muslim patokan dalam syariat itu mutlak hendaknya sebagai seorang muslim itu semua dijadikan cerminan dalam berpihak dan menjadi muslim yang cerdas dan taat adalah hal utama apapun kondisinya sekarang ini jika itu benar sampaikan dakwahkan jika itu salah sampaikan bahwa itu salah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertnada tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Rama Biswara

NPM : 1904010029

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagain-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 November 2023

Yang menyatakan



Ridho Rama Biswara
NPM. 1904010029

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا
لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ
الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (Q.s An-nur ayat 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkan dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada henti, saya persembahkan karya kecil ini kepada Bapak Agus Yanto dan Ibu Sri Subekti yang telah memberikan dukungan baik dari materi dan non materi, serta nasihat-nasihat yang luar biasa sehingga penulis dapat selalu semangat dan mampu menyelesaikannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah -Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pemberitaan Media Tentang UU Ciptaker Perspektif Islam” adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan (S1) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S,Sos Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dosen pembimbing pengajar maupun kalangan mahasiswa peneliti mengucapkan terimakasih kepada semuanya. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, motivasi, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena nya penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negri Metro.
2. Dr. H. Aguswan Khotibul Umam, MA., Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
3. Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dr. Umi Yawisah M.Hum., Pembimbing Skripsi pada penelitian ini.

Semoga bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT Aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat membantu

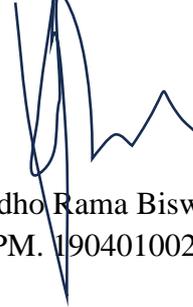
memperbaiki skripsi ini. Dan tidak lupa penulis selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, 07 November 2023

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final upward stroke, positioned over the printed name and NPM number.

Ridho Rama Biswara
NPM. 1904010029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMANAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
TABEL GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Peneltian Relevan	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	11
5. Teknis Analisa Data	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Dewan Pers dan Media	14
B. Analisis Wacana Kritis	15
C. Teori Teun A. Van Dijk.....	18
D. Surat Al Baqarah Ayat 42.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Deskripsi Teks Berita.....	23
B. Teori Hierarki Pengaruh isi Media	29
C. Pengaruh surat Al Baqarah ayat 42 dalam Hirearki Media.....	31
D. Analisis Teks Berita	33
E. Analisis Perbandingan Teks.....	39

BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tempo	23
Tabel 1.2 NU Online	25
Tabel 1.3 Kompas TV	28
Tabel 1.4 Demo Buruh.....	34
Tabel 1.5 Hari Buruh	36
Tabel 1.6 Cipta Kerja resmi dicabut	38

TABEL GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Berita Tempo	57
Gambar 1.2 Foto Berita Nu Online	58
Gambar 1.3 Foto Berita Kompas Tv	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Hasil Uji Plagiasi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Blanko Bimbingan Skripsi
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi dunia pers Indonesia mengalami perubahan cukup signifikan terutama berkaitan dengan kebebasan pers lahirnya Undang-Undang no. 40 tahun 1999 tentang pers menjadi harapan besar bagi publik sebagai pembawa aspirasi sekaligus institusi kontrol sosial. Karena sekitar 30 tahun lebih dimasa kekuasaan Orde Baru, pers Indonesia dibungkam dalam bayang-bayang pembredelan dan tak mampu menjalankan salah satu fungsinya sebagai kontrol sosial maupun *wacth dog* “anjing penjaga” kehidupan bernegara di Bumi Nusantara ini. Kala itu target utama penguasa Orde Baru terhadap pers adalah menciptakan pers yang tunduk pada kekuasaannya¹

Peran pers sangat penting dalam kontrol sosial agar menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Maka wajar bila pers bersifat mengkritik pemerintah dan bebas mengungkap peristiwa, selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6d Undang-undang Pers bahwa peranan Pers adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jika pers tanpa kebebasan maka pers tak akan bisa berfungsi apa apa. Karena bentuk kebebasan pers sendiri merupakan wujud kedaulatan rakyat.

¹ Kasiyanto, Kaesemin h. 2014, 32

Kini perubahan telah terjadi bahkan menjadi euforia tersendiri bagi kalangan pers Indonesia, namun bukan berarti reformasi memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi jurnalis dalam menjalankan peran dan tugasnya. Pers dijalankan dengan berpedoman pada kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Undang-Undang Pers dalam konsiderannya mengamanatkan bahwa pers Indonesia adalah pers yang profesional.

Kendati demikian euforia itu memunculkan semangat baru bagi masyarakat untuk berani melahirkan beragam media massa berbentuk surat kabar, tabloid, majalah, buletin, hingga media digital tanpa khawatir lagi dengan bayangan pembredelan.

Teknologi digital yang baru membawa Indonesia ke dua arah. Disatu sisi, digitalisasi membuat kaum oligarki mengontrol ranah media arus utama dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sekitar politik dan media. Pada saat yang sama juga, berbagai platform media digital digunakan oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan aktivisme dan pembebasan, dan warga biasa dapat menantang struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital yang efektif² ternyata perubahan pasca orde baru mempunyai dampak pada dunia pers menimbulkan fenomena besar dalam masyarakat, akses yang dipermudah dibantu dengan teknologi serta tanpa

² Ross Tapsell, h. 2017 : 7

bayang bayang pembredelan menjadikan pers sebagai satu satunya media informasi yang dikonsumsi publik dan dipercaya.

Kebebasan pers memunculkan beberapa media sehingga masyarakat harus pandai memilih dan memilah dalam mengkonsumsi berita portal berita yang ada beragam di Indonesia ada beberapa elemen masyarakat masing-masing bahkan mempunyai portal beritanya sendiri pemerintah dengan situs kenegaraan nya yang dikenal dengan domain *go.id*, portal berita swasta privat dengan domain *co.id*, portal berita swasta umum dengan domain *com* masing-masing mempunyai kebebasan memuat berita. Pemuka agama, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan sudah mempunyai portal beritanya masing-masing dalam hal ini dibutuhkan sebuah aturan absolut untuk menekan kebebasan untuk meminimalisir kegaduhan akibat banyaknya website berita aturan yang tidak memihak kebatilan aturan yang diakui serta aturan yang tidak dibuat perseorangan didalam islam ada beberapa aturan yang dimuat dalam Al Quran dan Hadits dalam hal ini penulis memilih surat Al Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Dan janganlah kalian campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya” Al Baqarah ayat 42.

Proses kebijakan publik sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh David Easton diawali dengan *input*, dilanjutkan dengan proses internal dalam sebuah *political system*, setelah itu terdapat sebuah *output* yang akan menimbulkan sebuah reaksi masyarakat. Sehingga memunculkan *feedback* yang digunakan sebagai evaluasi atau input baru. Dengan demikian, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dibawa dalam proses *political system* dan memunculkan kebijakan baru yang lebih baik sesuai dengan harapan public, ini harus diperhatikan betapa berpengaruhnya sebuah portal berita

Secara prinsip, Indonesia sebagai sebuah negara sejak lama telah mencoba menerapkan *good governance* dalam berbagai proses pembuatan kebijakan, salah satunya transparansi. Tujuannya, untuk menjaga kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Selain itu, transparansi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk partisipasi masyarakat, sehingga dapat memunculkan *ceck and balances* antara subjek pembuat kebijakan dengan objek yang akan menerima kebijakan. Namun, yang menjadi sebuah titik nadir, DPR mengungkapkan bahwasanya, selama pembahasan UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini sudah partisipatif. karena selalu disiarkan melalui televisi parlemen. Padahal, dengan disiarkan melalui televisi parlemen pun tidak semata-mata dapat meningkatkan partisipasi publik dalam tahap pembahasan UU tersebut

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Pemberitaan Media tentang UU Ciptaker Perspektif Islam

B. Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana termaktub dalam deskripsi latar belakang maka penulis memiliki pertanyaan “Apakah pemberitaan media tentang UU Ciptaker sesuai dengan aturan syariat Islam “

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

untuk mendeskripsikan bentuk kritik atas dasar nilai keislaman

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran dan pengembangan daya pikir serta diharapkan menjadi penelitian yang mampu mengimplementasikan nilai nilai dakwah dikalangan wartawan dan masyarakat secara luas baik secara praktik maupun teori.

a. Manfaat secara Teori

Menjadi manfaat untuk keilmuan dakwah dan media serta menjadi salah satu kajian ilmu wawasan yang luas.

b. Manfaat secara Praktik

Dapat menjadi rujukan arah gerak media dalam memenuhi kewajiban sebagai pemuat berita informasi tanpa menerobos nilai nilai keislaman.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian sumber acuan berupa hasil penelitian dari jurnal, skripsi, buku dan sebagainya. Penelitian relevan ini bertujuan untuk menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang di bahas. Peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang relevan tentang kritik media dan implementasi nilai nilai dakwah

1. Haitul Umam (2009) , dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Teun A Van Dijk Terhadap Skenario Film Perempuan Punya Cerita” hasil penelitian ini dari segi teks, kognisi sosial dan konteks sosial menghasilkan alur pembahasan mengenai hikmah terhadap perempuan pada film perempuan punya cerita, terdapat pola pembahasan pada teks struktur makro, superstruktur, kemudian struktur mikro sama halnya dengan piramid terbalik.
2. Arsitta Aghniya Mursalati (2014), dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Aanalisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Klarifikasi Tertangkapnya Ketua PWNU Banten Dalam Razia Penyakit Masyarakat di Harian Radar Banten” hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan pada struktur mikro dan pemberitaan terdapat kata “klarifikasi” “beliau” dan “teman lama” yang digunakan sebagai penghalus kalimat. Pada analisis kognisi

sosial wartawan menggunakan skema peristiwa (event schemas) pada elemen ini, dianalisis dengan melihat cara penulis menyampaikan klarifikasi langsung melalui saluran telepon. Analisis konteks sosial diperjelas dengan adanya pemilihan kata “Ketua PWNU Banten dan Kepala DPPKD Banten” hal tersebut diperjelas dengan adanya wawancara yang peneliti ini lakukan dengan Radar Banten yang mengaku pemberitaan ini diberhentikan karena adanya wewenang dari Pemerintah Daerah. Pemberitaan “Ulama NU Minta Klarifikasi Zainal” menurut peneliti ini wartawan mempunyai tendensi dibalik pemberitaan yang dibuatnya meskipun terdapat pro dan kontra para ulama yang dimuat diberita penelitian tetapi dalam wawancara penelitian ini penulis mengaku ia menuliskan fakta pada pemberitaan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti memilih metode ini karena penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk meneliti dokumen berupa teks, gambar, video dan sebagainya untuk memahami budaya pada suatu konteks sosial tertentu, hingga memahami ideologi dan makna

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari informan³. Peneliti ini disebut dengan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan akan dinyatakan dalam bentuk kata-kata ataupun gambar daripada angka.⁴ Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif

b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan analisis teks model Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Sebagai ganti istilah analisis wacana kritis, Van Dijk memilih istilah *Critical Discourse Studies* karena studi ini tidak hanya melibatkan analisis kritis tetapi juga teori kritis dan penerapannya secara kritis. Studi ini merupakan suatu perspektif, suatu pengambilan posisi atau sikap didalam disiplin studi wacana yang melibatkan berbagai disiplin ilmu wacana, psikologi, sejarah, ilmu sosial dan linguistik. Dengan multidisiplin itu, studi wacana kritis Van Dijk berambisi mendemistifikasi ideologi dan kepentingan yang sudah dibekukan dalam bahasa atau wacana.

³ Suharputra. *Metode penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181

⁴ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23

2. Sumber Data

Data adalah keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data merupakan hasil pencatatan yang baik yang berupa fakta, angka dan kata yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. “ Data adalah suatu bahan mentah yang merupakan hasil pengamatan atau pengukuran baik yang berbentuk angka maupun non angka jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat menghasilkan berbagai informasi.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut subjek penelitian akan diambil datanya dan selanjutnya akan disimpulkan, atau sejumlah subjek yang diteliti, penelitian kualitatif ini ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data penelitian ini bersumber dari dokumen eksternal terkait proses formulasi kebijakan publik yaitu pembertitaan UU Cipta Kerja. Alasan penggunaan dokumen sebagai sumber data seperti diungkap kan oleh Moleong⁶ Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong :

- 1) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

⁵ Yuyun Yunarti, *Pengantar Statistika*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 6

⁶ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Bandung 2015

- 2) Dokumen berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks.
- 3) Dokumen relatif murah dan mudah ditemukan dengan teknik analisis isi.
- 4) Dokumen tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
- 6) Dokumen/ buku/ penelitian/ jurnal tersebut perlu dianalisis dan dielaborasi agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan membantu peneliti lebih memahami fenomena tersebut.
- 7) Artikel, dokumen, buku atau surat-surat yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan berdasarkan jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian, maka teknik dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi Teks

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang sering dipakai dalam berbagai pengumpulan data. Metode

dokumentasi bertujuan dalam mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik library research yaitu pengumpulan literatur dari berbagai sumber. Teknik ini dilakukan sebagai pendukung bagi peneliti terhadap data data yang digunakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷

Metode ini melalui pengumpulan data baik mengenai identitas subjek penelitian, gambaran lokasi penelitian, serta data-data yang mendukung penelitian.

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

⁷ Ibid

beberapa sumber.⁸ Seluruh data dan informasi dikumpulkan dari sumber yang berbeda, sehingga terjadinya bias dalam penyusunan dan analisis data dapat dikurangi. Data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Melalui cara ini informasi tentang hal yang sama diperoleh dari berbagai pihak dapat dibandingkan, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah munculnya subjektivitas yang dapat membuat keraguan pada hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan yakni setelah data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

5. Teknis Analisa Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan analisis wacana. Data pada penelitian ini adalah teks berita “penolakan pengesahan UU Cipta Kerja” yang dianalisis dengan model Van Dijk, maka untuk menganalisis perlu dikembangkan suatu instrumen sebagai alat bantu analisis yang sesuai dengan model Van Dijk untuk memperoleh data yang diinginkan oleh tujuan penelitian ini.

a. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi dokumentasi.

b. Reduksi Data

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.

Reduksi merupakan bagian dari analisis. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap data yang ada. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur-unsur tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi yaitu membuat ringkasan yang inti, proses dan persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pers dan Media

Adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Yang dimaksud lembaga independen adalah dalam praktiknya tidak ada campur tangan pihak luar maupun intervensi dan ini dijamin oleh pemerintah, pers bebas mengekspresikan semua bentuk informasi yang akan dikonsumsi khalayak ramai pers menjadi satu satunya sumber informasi yang valid maka dari itu sebelum mencetak informasi data yang ada harus

kuat dan nyata informasi yang disampaikan harus *kredibel*⁹ pergulatan sejarah pers di Indonesia juga sangat menarik dari masa orde baru dewan pers sebagai penasihat pemerintah hingga masa reformasi berubah menjadi independen pelindung kemerdekaan pers. Tidak ada lagi hubungan secara struktural dengan pemerintah dihapuskannya departemen penerangan pada masa Gus Dur menjadi bukti. Dalam keanggotaan, tidak ada lagi wakil dari Pemerintah dalam Dewan Pers.

B. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis atau perbincangan dalam konteks sosial dan politis¹⁰. Analisis ini mengambil posisi melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial Analisis Wacana Kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistik diskursif, makna bersifat historis dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial¹¹.

Analisis wacana kritis berawal dari munculnya konsep analisis bahasa kritis (Critical Language Awareness) dalam dunia pendidikan barat. Analisis wacana kritis merupakan kelanjutan atau bahkan bagian dari analisis wacana (Discourse Analysis). Kajian analisis wacana (Discourse Analysis) ini begitu luas baik dari segi cakupannya,

⁹ Perihal dapat dipercaya (KBBI)

¹⁰ Van dijk, Teun 2000. "Discourse ideology and context"

¹¹ Jorgensen dan Phillips.2007."Feminist Critical Discourse Analysis and Children's Fantasy Fiction".

metodologinya, maupun pemaknaannya. Analisis wacana kritis mempunyai ciri yang berbeda dari analisis wacana yang bersifat “non-kritis”, yang cenderung hanya mendeskripsikan struktur dari sebuah wacana. Analisis ini bertindak lebih jauh, di antaranya dengan menggali alasan sebuah wacana memiliki struktur tertentu, yang pada akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antar pihak yang tercakup dalam wacana tersebut. Analisis ini juga merupakan kritik terhadap linguistik dan sosiologi. Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain sosial yang berbeda. Untuk menganalisis wacana, yang salah satunya bisa dilihat dalam area linguistik, yaitu dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks novel yang bisa menggunakan teori analisis wacana kritis

a. Karakteristik

- Tindakan

Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami

sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

- Konteks

Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

- Historis

Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya di dalam sejarah

- Kekuasaan

Kekuasaan menerapkan pengendalian terhadap satu orang atau kelompok mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. Pengendalian disini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga secara mental dan psikis.

- Ideologi

Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran dan kewajaran. Ideologi membuat anggota suatu

kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok.¹²

C. Teori Teun A. Van Dijk

Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana kritis, diantaranya politik, ras, gender dan kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang tiap-tiap bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 3 tingkatan :

- a. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita.
- b. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh.
- c. Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat proposisi, anak kalimat, parafrasa, dan gambar¹³

Analisis wacana Teun A Van Dijk merupakan wacana yang sering digunakan dalam penelitian. Hal ini kemungkinan karena Van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan

¹² Van,Dijk Teun A. 1993. Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society

¹³ Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.

dipakai secara praktis¹⁴ Menurut Van Dijk Penelitian suatu wacana tidak cukup hanya didasarkan pada teks semata karena pada kenyataannya teks hanyalah hasil dari suatu praktik produksi yang juga harus diamati. Jadi, harus dilihat pula bagaimana suatu teks diproduksi. Proses produksi itu melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Atas dasar inilah model analisis wacana yang dipakai Van Dijk sering disebut dengan “kognisi sosial”¹⁵

Analisis wacana Van Dijk ada tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Teks diteliti bagaimana struktur sebuah teks dan strategi wacana dipakai untuk memunculkan sebuah tema tertentu atau menegaskan tema tertentu. Dimensi kognisi sosial merupakan proses bagaimana teks diproduksi dengan melibatkan kognisi/pemikiran individu dari penulis. Sementara dimensi konteks sosial mempelajari struktur wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.

D. Surat Al Baqarah Ayat 42

Dalam surat Al Baqarah ayat 42 peneliti mengelaborasi dari berbagai tafsir dari kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa isi dari surat Al Baqarah ayat 42 memberikan aturan absolut¹⁶ tentang pembahasan mengenai kesaksian, keputusan dan maupun kepentingan

¹⁴ Eriyanto Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media., 2009; 221

¹⁵ Eriyanto Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media., 2011; 221

¹⁶ Mutlak (KBBI)

- Tafsir Ibnu Katsir

Allah Swt berfirman melarang orang-orang Yahudi melakukan hal yang biasa mereka kerjakan di masa lalu, misalnya mencampuradukkan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, memulas perkara yang batil dengan perkara yang hak, menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan perkara yang batil Allah Swt berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian mengetahui. (Al-Baqarah: 42)

Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan, dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, "*Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil*" (Al-Baqarah: 42), yakni janganlah kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan kedustaan. Abul Aliyah mengatakan, makna firman-Nya, "*Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil*" (Al-Baqarah: 42) artinya janganlah kalian mencampuri yang hak dengan yang batil, dan

tunaikanlah nasihat kepada hamba-hamba Allah dari kalangan umat Muhammad Saw.

Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Qatadah mengatakan bahwa firman-Nya, "*Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil*" (Al-Baqarah: 42), yakni janganlah kalian campur adukkan Yahudi dan Nasrani dengan Islam, sedangkan kalian mengetahui bahwa agama Allah itu adalah agama Islam; agama Yahudi dan agama Nasrani itu adalah bid'ah, bukan dari Allah. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri.

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *Dan janganlah kalian sembunyikan perkara yang hak, sedangkan kalian mengetahui.* (Al-Baqarah: 42

Artinya, janganlah kalian menyembunyikan apa yang ada pada kalian mengenai pengetahuan tentang Rasul-Ku dan apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), sedangkan kalian menemukan hal tersebut termaktub pada sisi kalian melalui apa yang kalian ketahui dari kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Hal yang semisal telah diriwayatkan dan Abul Aliyah. Mujahid, As-Saddi, Qatadah, dan Ar-Rabi' Ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan makna

firman-Nya, "*Dan janganlah kalian sembunyikan perkara yang hak*" (Al-Baqarah: 42), yakni Nabi Muhammad Saw.

Menurut pendapat kami, lafaz *taktumu* dapat dianggap majzum, dapat pula dianggap mansub. Dengan kata lain, artinya menjadi "janganlah kalian menyatukan antara ini dan itu (hak dan batil)." Perihalnya sama dengan perkataan, "*La ta-kulis samaka watasyrabal labana* (janganlah kamu makan ikan serta minum susu)."

Az-Zamakhshari mengatakan bahwa di dalam mushaf Ibnu Mas'ud disebutkan *wataktumunal haqqa* artinya 'sedangkan kalian ketika menyembunyikan perkara yang hak itu', *wa antum ta'lamuna*, yakni 'dalam keadaan mengetahui perkara hak tersebut'. Boleh pula diartikan 'sedangkan kalian mengetahui akibat perbuatan tersebut, yaitu berakibat mudarat yang besar atas umat manusia'. Mudarat yang besar tersebut ialah mereka sesat dari jalan hidayah yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka jika mereka menempuh jalan kebatilan yang kalian tampilkan kepada mereka, tetapi kalian pulas dengan semacam perkara yang hak agar dapat diterima oleh mereka. dan juga kalian warnai dengan penjelasan dan keterangan. pula kebalikannya, yaitu menyembunyikan yang hak dan mencampuradukkannya dengan yang batil

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Teks Berita

1. Tempo

Pada hari kamis 21 September 2023 Tempo memuat sebuah berita dengan judul “ Demo buruh : Massa tuntutan kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta kerja “ dalam isi berita presiden buruh Said Iqbal berorasi di depan kantor kementerian ketenagakerjaan dengan membawa dua tuntutan kenaikan upah 15% karena Indonesia sudah masuk sebagai negara *upper midle income country* dan pencabutan UU Cipta Kerja.

Tabel 1.1 Tempo

Demo buruh : Massa tuntutan kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta kerja	Tempo
Puluhan buruh mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh di Kementerian Ketenagakerjaan Jl Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Aksi demo buruh dihadiri oleh said Iqbal selaku presiden Partai Buruh merupakan gelombang aksi setiap hari di tiap kabupaten/kota di seluruh provinsi, Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh yang berasal dari Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Jakarta mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15% dengan alasan bahwa Indonesia sudah memasuki sebagai negara upper midle income country dan pencabutan UU ciptakerja.	Temuan : Dalam harian Tempo peneliti menemukan adanya upaya penyampaian kenaikan upah dengan dasar Indonesia sebagai Negara Upper Midle Income Country, dengan dasar ini para buruh yang tergabung dalam Partai Buruh menggaungkan kenaikan upah buruh dan juga dalam pemberitaan Tempo

	<p>memberitakan penolakan UU Ciptaker namun peneliti melihat bahwa dalam pemberitaan harian Tempo edisi kali ini substansial pemberitaan bukan pada penolakan UU Ciptaker melainkan sikap para buruh dan informasi tentang negara Indonesia masuk kembali dalam kategori MIC dengan demikian pemberitaan Tempo menurut peneliti kurang komprehensif apabila hendak menaikan tentang UU Ciptaker.</p>
--	--

2. NU Online

Pada hari Minggu 30 April 2023 NU Oline menerbitkan sebuah berita dengan judul “ Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan “ NU Online memberitakan menjelang hari buruh Sarbumusi (sarikat buruh muslim Indonesia) menolak dengan tegas tiga regulasi yang bertolak belakang dengan upaya pelibatan buruh sebgai pembangunan ekonomi nasional NU online juga memberitakan dengan detil tentang peraturan yang dimaksud sehingga pemberitaan penolakan ini dengan dasar yang kuat.

Tabel 1.2 NU Online

<p>Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan</p>	<p>NU Online</p>
<p>Jakarta, NU Online Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas menolak tiga regulasi yang dinilai bertolak belakang dari upaya pelibatan buruh sebagai pembangunan ekonomi nasional. Tiga regulasi yang ditolak itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, dan RUU Kesehatan (Omnibus Law). Presiden DPP K-Sarbumusi Irham Ali Saifuddin membeberkan alasan penolakan itu, yakni karena inklusi kesejahteraan buruh harus menjadi tumpuan orientasi utama bagi negara dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi nasional. "Karenanya, Konfederasi Sarbumusi menolak segala upaya dan kebijakan apa pun yang bertolak belakang dari hal tersebut, termasuk UU Nomor 6 tahun 2023, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 dan RUU Kesehatan," tegas Irham melalui keterangan tertulis yang diterima NU Online, Ahad (30/4/2023). Irham pun mendorong pemerintah dan semua pihak terkait agar hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional. Sebab kini perekonomian nasional telah tumbuh mencapai lebih dari 5 persen. "(Hal itu perlu dilakukan pemerintah) seiring dengan</p>	<p>Temuan :</p> <p>dalam headline berita kali ini peneliti menemukan isi substansial pemberitaan media yang unik dan komprehensif, gerakan tolak UU Ciptakerja ternyata sudah masuk kedalam media konservatif pemberitaan yang menjelaskan sampai pada dasar penolakan dan kecacatan dalam sebuah kebijakan sehingga media seperti ini yang bisa peneliti katakan sudah sesuai dengan kaidah syariat Islam pemberitaan yang menyeluruh tertata dan dengan dasar yang kuat.</p>

pemulihan perekonomian nasional yang sempat mengalami kontraksi hingga -2,07 persen pada 2020 dan kini telah tumbuh hingga 5,31 persen," kata Irham. Masalah-masalah UU Cipta Kerja Perjalanan UU Cipta Kerja menuai kontroversi, bahkan penolakan dari semua pihak dengan gelombang aksi massa di berbagai daerah, mulai dari mahasiswa hingga buruh. Meski begitu, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh memuluskan jalan UU Cipta Kerja. Sejumlah pasal di dalam UU Cipta Kerja juga menjadi sorotan bagi kaum buruh. Utamanya pada pasal 64-66 tentang pekerja alih daya atau outsourcing yang dinilai tidak jelas. Aturan ini dianggap akan menjadi ketentuan umum pemberian kerja di Indonesia dalam segala jenis pekerjaan. Soal status pekerja alih daya ini sebenarnya sudah berjalan baik lewat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur pekerja alih daya yang hanya berlaku untuk lima jenis pekerjaan seperti sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa migas pertambangan. Kemudian ada pasal 79 dan pasal 84 mengenai pemberian cuti panjang yang tidak lagi menjadi kewajiban perusahaan. Pada pasal itu, perusahaan hanya memberikan beberapa jenis cuti seperti tahunan, cuti istirahat antar jam kerja, dan libur mingguan. Masalah-masalah Permenaker 5/2023 Salah satu yang disorot Konfederasi Sarbumusi adalah karena melalui Permenaker ini, upah buruh di lima industri padat karya berorientasi ekspor dimungkinkan dipotong hingga 25 persen. Lima industri tersebut adalah industri tekstil dan pakaian jadi; industri alas kaki; industri kulit dan barang kulit; industri furnitur; dan industri mainan anak. Pemotongan upah buruh itu dimungkinkan apabila perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor terdampak perubahan ekonomi global. Hal ini tercantum di dalam pasal 8 ayat 1 pada

<p>Bagian Ketiga Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. "Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah yang biasa diterima," begitu bunyi aturan dalam pasal 8 ayat 1. Masalah RUU Kesehatan RUU Kesehatan menuai polemik. Salah satu yang memunculkan kontroversi adalah soal penyejajaran produk hasil tembakau dengan narkoba dan minuman beralkohol. Ketentuan itu termaktub di dalam draf rancangan pasal 154 ayat 3 yang berbunyi bahwa zat adiktif dapat berupa: a. narkoba; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya. Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'RUU Kesehatan: Nasib Petani dan Industri Tembakau' pada 11 April 2023 lalu secara tegas juga menolak penyejajaran tembakau dengan zat adiktif terlarang lainnya karena akan berdampak pada kehidupan perekonomian petani tembakau di berbagai daerah. Pewarta: Aru Lego Triono Editor: Fathoni Ahmad</p>	
---	--

3. Kompas TV

Pada tanggal 6 Januari 2023 Kompas TV menerbitkan berita dengan judul “ Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022 “ dalam isi berita Kompas TV memberitakan bahwa Perppu no 2 tahun 2022 resmi sejak diberlakukan mulai dari 30 Desember 2023 dan itu dianggap menghapus pasal dalam Omnibuslaw akan tetapi UU Cipta kerja tetap berlaku apabila pasal

pasal dalam UU cipta kerja tidak bertentangan dengan Perppu no 2 tahun 2022.

Tabel 1.3 Kompas TV 1

Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022	Kompas TV
<p>JAKARTA, KOMPAS.TV - Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit.</p> <p>Perppu No 2 tahun 2022 ini dinyatakan resmi diberlakukan sedari tanggal diundangkan yakni tanggal 30 Desember 2022.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri dalam kesempatannya menjadi narasumber terkait sosialisasi Perppu No 2 tahun 2022 secara daring, pada Jumat (6/1/2023).</p> <p>“Dengan terbitnya perppu cipta kerja ini maka perppu cipta kerja mengubah ya, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam empat undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan,” ujar tutur Indah</p> <p>“Pertama yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kedua Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang SJSN atau sistem jaminan sosial nasional, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan kemudian Undang-Undang nomor</p>	<p>Temuan :</p> <p>Pada pemberitaan kali ini peneliti menemukan teori propaganda yang dimana pada badan berita peneliti membaca bahwa UU Ciptaker dicabut dengan alasan kemuncuan Perppu no 2 tahun 2022 hal itu langsung di klarifikasi oleh Dirjen PHI Kemnaker bahwa kehadiran Perppu menghapus mencabut UU Ciptaker apabila pasal dalam UU Ciptaker bersebrangan dengan Perppu yang dimaksud secara teks memang benar namun kembali dipertegas bahwa apabila pasal yang tidak bersebarangan dengan Perppu maka UU Ciptaker tetap berlaku maka bisa peneliti katakan bahwa pencabutan UU Ciptaker tidak sah secara eksplisit namun sah secara teks pemberitaan sudah</p>

<p>18 tahun 2017 perlindungan pekerja migran Indonesia,” tambahnya. Namun, Ida menekankan walaupun UU Cipta Kerja resmi dicabut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perppu</p>	<p>jelas dengan maksud bahwa Kompas memanfaatkan momentum dan dipadukan dengan Headline yang menarik untuk dibaca namun jal ini tidak sejalan dengan kaidah syariat Islam karena pemberitaan bisa dikatakan menipulatif Headline.</p>
---	---

B. Teori Hierarki Pengaruh isi Media

Menurut Saussure, persepsi dan pandangan kita tentang realitas, dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Hal ini dianggap sebagai pendapat yang cukup mengejutkan dan dianggap revolusioner, karena hal itu berarti tanda membentuk persepsi manusia, lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada¹⁷ Itu pula yang memunculkan pendapat Paul Watson, salah seorang pendiri *Greenpeace*, tentang perilaku media massa. Menurutnya, konsep kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran yang sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Ringkasnya, kebenaran ditentukan oleh media massa

Jika sinyal elemen ini benar, dapat kita bayangkan betapa beratnya tugas pembaca dalam menyikapi sebuah berita. Pembaca harus memiliki kemampuan memadai untuk menyaring sebuah berita agar menemukan kebenaran, setidaknya mendekati kebenaran.

¹⁷ Bignell dalam Sobur, 2015, h. 87

Karena itu, salah satu cara untuk membantu pembaca menyikapi pers adalah konteks pemberitaan. Lewat konteks pemberitaan, pembaca bisa memahami masalah yang ada dan pemecahan masalah yang ditampilkan tidak berlaku untuk konteks yang lain. Lewat konteks pemberitaan ini pembaca dapat menyadari bahwa wartawan kadang menghadirkan “madu” dalam menu beritanya, kadang pula dalam berita yang lain wartawan menuangkan “racun”. Melalui konteks pemberitaan ini pembaca mengerti bahwa berita yang buruk bisa dibungkus dengan bahasa yang manis sehingga tampak samar dan menyenangkan. Singkat kata, konteks pemberitaan menjadi alat yang sangat penting.

Pada deskriptif ketiga berita dari beberapa media semuanya mempunyai ciri khas akan tetapi ada kesamaan mengenai pembahasan tentang UU Cipta Kerja yaitu atas dasar penolakan terhadap UU Cipta Kerja, pada portal berita Tempo dengan mengangkat kaum buruh dan isu kenaikan upah sebesar 15% Tempo memberitakan secara lugas dibuka dengan judul penolakan buruh dan dilanjut adanya Presiden Partai Buruh yang sedang orasi, pada portal berita Kompas TV memberitakan secara lugas tentang UU Cipta Kerja akan tetapi tidak disampaikan secara pasti tentang wacana penolakan UU Cipta Kerja pada pemberitaan Kompas lebih condong terhadap edukasi bahwa beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja tidak akan berlaku apabila berseberangan dengan Perppu no 2 tahun 2022 namun tetap berlaku apabila tetap satu jalan, media seperti ini memang akan lebih memilih berada ditengah-tengah karena eksistensinya dikenal dengan

media swasta hiburan berbeda dengan Tempo yang memang sudah terpercaya independensinya kesamaan dari kedua media ini adalah semuanya mempunyai kepentingan dan bebas melakukan pemberitaan tanpa terhalangi oleh ideologi apapun seperti media konservatif, dan yang ketiga adalah NU Online memberitakan dalam portal medianya dengan isu yang dinaikan sangat tegas menolak UU Cipta Kerja pemberitaan sangat lugas dan komprehensif dijelaskan atas dasar yang kuat ditambah dengan beberapa penolakan seperti RUU Kesehatan dan Permenaker 5/2023 , ketiganya dijelaskan secara rinci kalau ditarik secara luas portal berita NU Online sesuai dengan kaidah Surat Al Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

"Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian mengetahui". (Al-Baqarah: 42)

Tidak hanya melakukan pemberitaan portal media NU Online juga sebagai bentuk dakwah dibidang jurnalisme, pada dasarnya jurnalisme sudah diberi kebebasan maka sebagai seorang muslim diantara kebebasan itu juga tetap harus ada yang dijaga yaitu kejujuran dan keadilan.

C. Pengaruh surat Al Baqarah ayat 42 dalam Hierarchy Media

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt berfirman melarang orang-orang Yahudi melakukan hal yang biasa mereka kerjakan di masa lalu, misalnya mencampurkan antara perkara yang hak dengan

perkara yang batil, memulas perkara yang batil dengan perkara yang hak, menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan perkara yang batil dalam teori hirarki pengaruh isi media konsep kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran yang sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran artinya segala pemberitaan yang dilakukan bida saja langsung dianggap benar oleh masyarakat hal ini harus disadari oleh seluruh portal media, jika pers sebagai media penyampai kepada masyarakat maupun sebaliknya segala bentuk pemberitaan harus sangat objektif dalam kasus pemberitaan UU Cipta Kerja pemberitaannya sangat kontroversi akan tetapi segala bentuk kontroversi itu bisa hilang jika amalan surat Al Baqarah ayat 42 ini diterapkan secara masif sebagaimana disampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Az-Zamakhshary mengatakan bahwa di dalam mushaf Ibnu Mas'ud disebutkan wataktumunal haqqa artinya `sedangkan kalian ketika menyembunyikan perkara yang hak itu', *wa antum ta'lamuna*, yakni `dalam keadaan mengetahui perkara hak tersebut'. Boleh pula diartikan `sedangkan kalian mengetahui akibat perbuatan tersebut, yaitu berakibat mudarat yang besar atas umat manusia'. Mudarat yang besar tersebut ialah mereka sesat dari jalan hidayah yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka jika mereka menempuh jalan kebatilan yang kalian tampilkan kepada mereka, tetapi kalian pulas dengan semacam perkara yang hak agar dapat diterima oleh mereka. dan juga kalian warnai dengan penjelasan dan keterangan. pula kebalikannya, yaitu menyembunyikan yang hak dan encampuradukkannya dengan yang batil.

Dengan demikian pentingnya memahami yang hak dan batil harus sedari awal supaya terhindar seperti apa yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan, dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, "*Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil*" (Al-Baqarah: 42), yakni janganlah kalian memalsukan yang hak dan yang bathil.

D. Analisis Teks Berita

Ada tiga berita dari masing-masing portal berita berbeda yang akan peneliti analisis yaitu Tempo dengan judul berita "Demo Buruh : massa menuntut kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta Kerja" kemudian Nu Online dengan judul "Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta Kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan" dan yang terakhir Kompas TV dengan judul "Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022".

Peneliti menggunakan metode analisis kritis van Dijk, jenis analisis ini digunakan untuk menganalisis politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni dan sejenisnya¹⁸ agar hasil analisis tidak melebar maka peneliti mengacu pada analisis teks versi van Dijk dalam beberapa poin yaitu :

¹⁸ Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media

- a. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita.
- b. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh.
- c. Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat proposisi, anak kalimat, parafrasa, dan gambar¹⁹

Tabel 1.4 Demo Buruh

Tempo		
Judul berita	Demo Buruh : massa tuntutan kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta Kerja	
Struktur Makro	Superstruktur	Struktur Mikro
Makna umum dalam berita tempo kali ini diambil dari penekanan kalimat “mendukung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15% dengan alasan bahwa Indonesia sudah	Kerangka suatu teks dalam berita tempo sehingga menjadi teks berita yang utuh Topik : Puluhan buruh mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh di	Bagian kecil dari beberapa teks berita Tempo ada pada kalimat “Penolakan UU Cipta Kerja” “demo Buruh dilakukan setiap hari ditiap kabupaten dan kota” bagian kecil pada

¹⁹ Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.

<p>memasuki sebagai negara upper midle income country” yaitu penekanan terhadap kesejahteraan buruh dengan mengambil 2 momentum penolakan UU Cipta Kerja dan negara upper midle income country.</p>	<p>Kementrian Ketenagakerjaan Jl Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Sub Topik : Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Aksi demo buruh dihadiri oleh said Iqbal selaku presiden Partai Buruh merupakan gelombang aksi setiap hari Signifikasi : mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15% dengan alasan bahwa Indonesia sudah memasuki sebagai negara upper midle income country dan penolakan UU Cipta kerja.</p>	<p>berita adalah bagian yang mempunyai penjelasan Panjang tersendiri pada sebuah berita yang semua orang sudah tau makna dari bagian kecil dari berita itu sehingga menjadi kalimat kompleks untuk dicantumkan pada sebuah teks berita menjadi teks utuh pada berita.</p>
---	--	---

Tabel 1.5 Hari Buruh

Nu Online		
Judul Berita	Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta Kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan	
Struktur Makro	Superstruktur	Struktur Mikro
Makna umum dalam berita ini cukup kompleks karena ada poin poin yang dijelaskan secara rinci dibuktikan dalam beberapa kalimat “Nahdlatul Ulama secara tegas menolak tiga regulasi yang dinilai bertolak belakang dari upaya pelibatan buruh sebagai pembangunan ekonomi nasional. Tiga regulasi yang ditolak itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	Kerangka teks pada rilis berita ini sehingga menjadi berita utuh dibagi menjadi 3 bagian umum Topik : Memperingati hari buruh Nu menegaskan menolak UU Ciptakerja. Dibuktikan dengan judul berita dan kalimat berita yang berisi penjelasan kekurangan Omnibuslaw. Sub Topik : penolakan Ruu Kesehatan dan permenaker 5/2023 dibuktikan pada kalimat	Struktur terkecil yang membuat berita ini mempunyai nilai lebih adalah disebutkan nya FGD dan Perhimpunan Pesantren hal itu ada pada kalimat “Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dalam Focus Group Discussion (FGD) membeberkan alasan penolakan itu, yakni karena inklusi kesejahteraan buruh harus menjadi tumpuan orientasi utama bagi

<p>Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, dan RUU Kesehatan (Omnibus Law) “ kalau melihat dari judul Nu online sedang memberitakan mengenai sikap pada beberapa kebijakan</p>	<p>berita yang menjadi bagian pendukung penilakan UU Ciptakerja “Masalah RUU Kesehatan RUU Kesehatan menuai polemik. Salah satu yang memunculkan kontroversi adalah soal penyejajaran produk hasil tembakau dengan narkotika dan minuman beralkohol. Ketentuan itu termaktub di dalam draf rancangan pasal 154 ayat 3” Signifikasi : mengungkap sikap Nu terutama Sarbumusi Nu terhadap pasal pasal karet yang dibuat.</p>	<p>negara dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi nasional”</p>
---	--	---

disesuaikan dengan peringatan hari buruh.		
---	--	--

Tabel 1.6 Cipta Kerja resmi dicabut

Kompas TV		
Judul Berita	Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022	
Struktur Makro	Superstruktur	Struktur Mikro
Makna umum pada rilis berita ini adalah Perppu no 2 tahun 2022 pasalnya diatas omnibuslaw secara hiearki dibuktikan pada kalimat “Dengan terbitnya perppu cipta kerja ini maka perppu cipta kerja mengubah ya, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam empat undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan” hal ini diperkuat juga pada kalimat “Namun, Ida	Topik : Perppu menghapus UU Ciptakerja Hal ini dibuktikan pada judul berita dan pada kalimat “Dengan terbitnya perppu cipta kerja ini maka perppu cipta kerja mengubah ya, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam empat undang-undang	Struktur terkecil pada berita ini justru ada pada UU Ciptakerja itu sendiri yang dimaksudkan pada Perppu no 2 tahun 2022 dibuktikan pada kalimat “Namun, Ida menekankan walaupun UU Cipta Kerja resmi dicabut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

<p>menekankan walaupun UU Cipta Kerja resmi dicabut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perppu ”</p>	<p>terkait dengan ketenagakerjaan” Sub Topik : Pengaruh Perppu daripada UU Ciptakerja Signifikansi : Perppu hanya menghapus pasal pada UU Ciptakerja yang bertentangan dengan Perppu tidak menghapus UU Ciptakerja sendiri.</p>	<p>UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu”</p>
---	---	---

E. Analisis Perbandingan Teks

Dari ketiga berita yang sudah peneliti analisis dan temuannya peneliti melihat bahwa dengan dasar surat Al Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian mengetahui. (Al-Baqarah :42)

dalam rilisan berita Tempo dengan judul “Demo Buruh : Massa tuntutan kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta Kerja” elaborasi antara surat Al Baqarah ayat 42 sebagai perspektif Islam dan Analisis Wacana Kritis

analisis teks peneliti melihat bahwa dalam rilis berita ini mengangkat soal isu kenaikan upah buruh dan pencabutan UU Ciptakerja yang dimaksud dengan pencabutan UU Ciptakerja ternyata dalam berita ini tidak dimaksudkan secara spesifik di dalam berita justru inti pemberitaan mengenai kegiatan partai buruh dibuktikan dalam kalimat “Aksi demo buruh dihadiri oleh Said Iqbal selaku presiden Partai Buruh merupakan gelombang aksi setiap hari di tiap kabupaten/kota di seluruh provinsi, Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh yang berasal dari Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Jakarta” dalam analisis teks ternyata pencabutan UU Ciptakerja hanyalah bagian mikro atau skala kecil dalam struktur pemberitaan sebagai pelengkap karena keterkaitan antara upah dan penolakan UU Ciptakerja kekurangannya adalah tidak spesifik penyebutan Pencabutan UU Ciptakerja di dalam judul berita jika dikaitkan dengan tafsir surat Al Baqarah ayat 42 “Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan, dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, *"Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil"* (Al-Baqarah: 42), yakni janganlah kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan kedustaan” maka dari itu penyebutan “Pencabutan UU Cipta Kerja” dalam judul harus dijelaskan secara spesifik.

Kedua, rilis berita oleh NU Online dengan judul “Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta Kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU

Kesehatan” rilisan berita oleh Nu Online mengangkat soal isu hari buruh, Permenaker 5/2023 dan RUU Kesehatan dengan judul yang secara gampang sederhana media konservatif ini menunjukkan sikap bahwa NU menolak dengan tegas melalui Sarbumusi dibuktikan dengan kalimat “NU Online Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas menolak tiga regulasi yang dinilai bertolak belakang dari upaya pelibatan buruh sebagai pembangunan ekonomi nasional. Tiga regulasi yang ditolak itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, dan RUU Kesehatan (Omnibus Law)” peneliti menemukan bahwa antara judul berita dan isi berita serta maksud berita dijelaskan secara spesifik oleh NU Online Permenaker 5/2023, Penolakan UU Ciptakerja serta RUU Kesehatan di dalam berita dijelaskan mengapa media ini menolak kalau disandingkan dengan surat Al Baqarah ayat 42 dengan tafsirnya “Allah Swt. melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan, dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, *"Janganlah kalian campur*

adukkan yang hak dengan yang batil" (Al-Baqarah: 42), yakni janganlah kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan kedustaan” maka dari itu penyebutan” maka NU Online membuktikan esensinya sebagai media konservatif dengan tetap menjaga prinsip keislmanan nya seperti rilisan berita ini yang sesuai dengan maksud tafsir surat Al Baqarah ayat 42.

Ketiga, rilisan berita oleh Kompas Tv dengan judul “Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022” berbeda dengan kedua rilisan berita sebelumnya yang sudah peneliti analisis pemberitaan Kompas Tv melihat melalui judul seperti angin segar bahwa UU Cipta Kerja sudah dicabut ternyata tidak demikian pencabutan UU Cipta Kerja yang dimaksud dalam isi berita adalah penghapusan pasal yang bertentangan dengan Perppu no 2 tahun 2022 hal ini dibuktikan pada kalimat “Ida menekankan walaupun UU Cipta Kerja resmi dicabut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perppu” hal ini bertentangan dengan perspektif Islam yang dimaksud oleh surat Al Baqarah ayat 42.

Dari pemberitaan yang sudah peneliti analisis perbandingan antara ketiga rilisan berita ada pada signifikasi berita keterkaitan antara judul dan isi berita tentunya dilihat dari perspektif Islam hanya NU Online yang sesuai dengan maksud surat Al Baqarah ayat 42 karena pemberitaan yang komprehensif dan detail serta antara judul isi dan maksud berita seimbang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dari ketiga berita yang penulis analisis hanya satu yaitu rilisan berita dari Nu Online yang sesuai dengan ketentuan perspektif Islam surat Al Baqarah ayat 42. Diambil dari ketiga sumber data pemberitaan maka menjawab pertanyaan penelitian bahwa pemberitaan media tidak sesuai dengan perspektif islam yang memenuhi kualifikasi karena hanya satu dari tiga rilisan berita yang sesuai perspektif komunikasi islam dari surat Al Baqarah ayat 42 mengenai analisis pemberitaan media tentang uu ciptakerja perspektif islam bahwa diantara revolusi kebebasan pers terbagi menjadi dua jurnalisme digunakan untuk memanfaatkan kepentingan oligarki dan untuk melakukan pembebasan keduanya akan selalu hadir didalam negara demokrasi, dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini juga ada yang pro dan kontra ini adalah cerminan akan ada sebuah pilihan dari berbagai faktor, dan sebagai seorang muslim patokan dalam syariat itu mutlak hendaknya sebagai seorang muslim itu semua dijadikan cerminan dalam berpihak dan menjadi muslim yang cerdas.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian analisis pemberitaan media perspektif islam peneliti memberikan saran untuk semua pembaca sebagai seorang muslim hendaknya menjadi cerdas dan taat adalah hal utama apapun

kondisinya sekarang ini jika itu benar sampaikan dakwahkan jika itu salah sampaikan bahwa itu salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsitta, Aghniya Mursalati, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Klarifikasi Tertangkapnya Ketua PWNU Banten Dalam Razia Penyakit Masyarakat di Harian *Radar Banten*” (2014)
- Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Lkis Printing Cemerlang: Yogyakarta
- Jorgersen dan Phillips.2007.“Feminist Critical Discourse Analysis and Children’s Fantasy Fiction”
- Kasiyanto Kasemin. 2014. *Sisi Gelap Kebebasan Pers*. Prenadamedia Group : Jakarta.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya 2015.
- Ross Tapsell. 2017. *Kuasa Media di Indonesia*, Terj. Wahyu Prasetyo Utomo. CV. Marjin Kiri: Serpong
- Suharputra. *Metode penelitan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Umam, Haitul, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Teun A Van Dijk Terhadap Skenario Film Perempuan Punya Cerita” (2009)
- Kitab tafsir Ibnu Katsir
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Van Dijk, Teun A. *Critical Discourse Analysis*. Diambil dari situs www.discourses.org

Yunarti, Yuyun *Pengantar Statistika*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)

Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0460/In.28.4/D.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

11 April 2022

Yth.
Dr. Umi Yawisah, M.Hum
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ridho Rama Biswara
NPM : 1904010029
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : Kritik Media dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik (Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk di Fajar Sumatera Online Menurut Perspektif Islam)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
 - 3 Diwajibkan mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
 - 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian suarat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Wahyudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1391/In.28.4/J.1/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I
 NIP : 197702182000032001
 Jabatan : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menerangkan bahwa

Nama : Ridho Rama Biswara
 NPM : 1904010029
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Judul : Analisis Pemberitaan Media tentang UU Ciptaker : Perspektif Islam

Mahasiswa tersebut, telah melaksanakan uji plagiasi **Skripsi** melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2023
 Ketua Program Studi KPI



Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I
 NIP. 197702182000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-86/In.28/S/U.1/OT.01/01/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ridho Rama Biswara
NPM : 1904010029
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1904010029

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Februari 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Rama Biswara
 NPM : 190401029

Jurusan/Prodi : FUAD/KPI
 Semester/ TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 11/12-23	✓	- salah tulis → Revisi - Penomoran halaman → Revisi - Kesimpulan : menjawab pertanyaan peneliti	
	Rabu 12/12-23	✓	abstrak → 3 paragraf (Tuj., Metode Pen., Kesimpulan)	
	Kamis 13/12-23	✓	Revisi Ok Acc utk monev	

Pembimbing ,

Dr. Umi Yawisati, M.Hum.
 NIP.196204241999032001

Mahasiswa Ybs,

Ridho Rama Biswara
 NPM. 1904010029

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
OBSERVASI TEKS BERITA DAN GAMBAR
ANALISIS PEMBERITAAN UU CIPTAKERJA PERSPEKTIF ISLAM

A. Teks berita

Judul berita	Isi berita	Media
Demo buruh : Massa menuntut kenaikan upah 15% dan pencabutan UU Cipta kerja	Puluhan buruh mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh di Kementerian Ketenagakerjaan Jl Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Aksi demo buruh dihadiri oleh Said Iqbal selaku presiden Partai Buruh merupakan gelombang aksi setiap hari di tiap kabupaten/kota di seluruh provinsi, Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh yang berasal dari Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Jakarta mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15% dengan alasan bahwa Indonesia sudah memasuki sebagai negara upper middle income country dan pencabutan UU ciptakerja.	Tempo
Hari buruh, Sarbumusi NU tegaskan tolak UU Cipta kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan	Jakarta, NU Online Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas menolak tiga regulasi yang dinilai bertolak belakang dari upaya pelibatan buruh sebagai pembangunan ekonomi nasional. Tiga regulasi yang ditolak itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja	NU Online

	<p>dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, dan RUU Kesehatan (Omnibus Law). Presiden DPP K-Sarbumusi Irham Ali Saifuddin membeberkan alasan penolakan itu, yakni karena inklusi kesejahteraan buruh harus menjadi tumpuan orientasi utama bagi negara dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi nasional. "Karenanya, Konfederasi Sarbumusi menolak segala upaya dan kebijakan apa pun yang bertolak belakang dari hal tersebut, termasuk UU Nomor 6 tahun 2023, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 dan RUU Kesehatan," tegas Irham melalui keterangan tertulis yang diterima NU Online, Ahad (30/4/2023). Irham pun mendorong pemerintah dan semua pihak terkait agar hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional. Sebab kini perekonomian nasional telah tumbuh mencapai lebih dari 5 persen. "(Hal itu perlu dilakukan pemerintah) seiring dengan pemulihan perekonomian nasional yang sempat mengalami kontraksi hingga -2,07 persen pada 2020 dan kini telah tumbuh hingga 5,31 persen," kata Irham. Masalah-masalah UU Cipta Kerja Perjalanan UU Cipta Kerja menuai kontroversi, bahkan penolakan dari semua pihak dengan gelombang aksi massa di berbagai daerah, mulai dari mahasiswa hingga buruh. Meski begitu, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh memuluskan jalan UU Cipta Kerja. Sejumlah pasal di dalam UU Cipta Kerja juga menjadi</p>	
--	---	--

	<p>sorotan bagi kaum buruh. Utamanya pada pasal 64-66 tentang pekerja alih daya atau outsourcing yang dinilai tidak jelas. Aturan ini dianggap akan menjadi ketentuan umum pemberian kerja di Indonesia dalam segala jenis pekerjaan. Soal status pekerja alih daya ini sebenarnya sudah berjalan baik lewat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur pekerja alih daya yang hanya berlaku untuk lima jenis pekerjaan seperti sopir, petugas kebersihan, sekuriti, catering, dan jasa migas pertambangan. Kemudian ada pasal 79 dan pasal 84 mengenai pemberian cuti panjang yang tidak lagi menjadi kewajiban perusahaan. Pada pasal itu, perusahaan hanya memberikan beberapa jenis cuti seperti tahunan, cuti istirahat antar jam kerja, dan libur mingguan. Masalah-masalah Permenaker 5/2023 Salah satu yang disorot Konfederasi Sarbumusi adalah karena melalui Permenaker ini, upah buruh di lima industri padat karya berorientasi ekspor dimungkinkan dipotong hingga 25 persen. Lima industri tersebut adalah industri tekstil dan pakaian jadi; industri alas kaki; industri kulit dan barang kulit; industri furnitur; dan industri mainan anak. Pemotongan upah buruh itu dimungkinkan apabila perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor terdampak perubahan ekonomi global. Hal ini tercantum di dalam pasal 8 ayat 1 pada Bagian Ketiga Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. "Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat</p>	
--	---	--

	<p>melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah yang biasa diterima," begitu bunyi aturan dalam pasal 8 ayat 1. Masalah RUU Kesehatan RUU Kesehatan menuai polemik. Salah satu yang memunculkan kontroversi adalah soal penyejajaran produk hasil tembakau dengan narkoba dan minuman beralkohol. Ketentuan itu termaktub di dalam draf rancangan pasal 154 ayat 3 yang berbunyi bahwa zat adiktif dapat berupa: a. narkoba; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya. Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'RUU Kesehatan: Nasib Petani dan Industri Tembakau' pada 11 April 2023 lalu secara tegas juga menolak penyejajaran tembakau dengan zat adiktif terlarang lainnya karena akan berdampak pada kehidupan perekonomian petani tembakau di berbagai daerah. Pewarta: Aru Lego Triono Editor: Fathoni Ahmad</p>	
<p>Kemnaker sebut UU Cipta Kerja resmi dicabut diganti dengan Perppu no 2 tahun 2022</p>	<p>JAKARTA, KOMPAS.TV - Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Perppu No 2 tahun 2022 ini dinyatakan resmi diberlakukan sedari tanggal diundangkan yakni tanggal 30 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Dirjen</p>	<p>Kompas TV</p>

	<p>Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri dalam kesempatannya menjadi narasumber terkait sosialisasi Perppu No 2 tahun 2022 secara daring, pada Jumat (6/1/2023).</p> <p>“Dengan terbitnya perppu cipta kerja ini maka perppu cipta kerja mengubah ya, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam empat undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan,” ujar tutur Indah “Pertama yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kedua Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang SJSN atau sistem jaminan sosial nasional, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 perlindungan pekerja migran Indonesia,” tambahnya. Namun, Ida menekankan walaupun UU Cipta Kerja resmi dicabut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perppu</p>	
--	---	--

B. Gambar

Gambar 1.1 Foto Berita Tempo Demo Buruh : Massa Tuntut kenaikan Upah 15% Persen dan Pencabutan UU Cipta Kerja



Puluhan Buruh melakukan aksi dengan menggantungkan benner yang bertuliskan tuntutan buruh di Kantor Kementerian Ketenagakeriaan. Il. Gatot Subroto.

Gambar 1.2 Foto Berita Nu Online Hari Buruh, Sarbumusi Nu Tegaskan Tolak UU Cipta Kerja, Permenaker 5/2023, dan UU kesehatan

21:00 @ 482KB/d 4G

nu.or.id/nasional/hari- + 2

nuonline

Nasional

Hari Buruh, Sarbumusi NU Tegaskan Tolak UU Cipta Kerja, Permenaker 5/2023, dan RUU Kesehatan

Ahad, 30 April 2023 | 13:00 WIB



Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama. (Foto: NU Online)

 **Aru Lego Triono**
Penulis

Jakarta, **NU Online**
Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas

21:01 152KB/d 4G 73

nu.or.id/nasional/hari-

nuonline

Jakarta, **NU Online**
Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama secara tegas menolak tiga regulasi yang dinilai bertolak belakang dari upaya pelibatan buruh sebagai pembangunan ekonomi nasional.

Tiga regulasi yang ditolak itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, dan RUU Kesehatan (Omnibus Law).

ADVERTISEMENT

← AdChoices ▶

BERITA NU ONLINE

21:01 7,2KB/d 4G 73

nu.or.id/nasional/hari-

nuonline

Presiden DPP K-Sarbumusi Irham Ali Saifuddin membeberkan alasan penolakan itu, yakni karena inklusi kesejahteraan buruh harus menjadi tumpuan orientasi utama bagi negara dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

"Karenanya, Konfederasi Sarbumusi menolak segala upaya dan kebijakan apa pun yang bertolak belakang dari hal tersebut, termasuk UU Nomor 6 tahun 2023, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 dan RUU Kesehatan," tegas Irham melalui keterangan tertulis yang diterima *NU Online*, Ahad (30/4/2023).

ad

Irham pun mendorong pemerintah dan semua pihak terkait agar hendaknya menjadikan buruh

FOTO BERITA NU ONLINE

21:01 0,5KB/d 4G 73

nu.or.id/nasional/hari-

nuonline

Irham pun mendorong pemerintah dan semua pihak terkait agar hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional. Sebab kini perekonomian nasional telah tumbuh mencapai lebih dari 5 persen.

"(Hal itu perlu dilakukan pemerintah) seiring dengan pemulihan perekonomian nasional yang sempat mengalami kontraksi hingga -2,07 persen pada 2020 dan kini telah tumbuh hingga 5,31 persen," kata Irham.

Masalah-masalah UU Cipta Kerja
Perjalanan UU Cipta Kerja menuai kontroversi, bahkan penolakan dari semua pihak dengan gelombang aksi massa di berbagai daerah, mulai dari mahasiswa hingga buruh. Meski begitu, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh memuluskan jalan UU Cipta Kerja.

Baca Juga

Hari Buruh, NU: Tegakkan Hak dan Perlindungan Pekerja Perempuan

Jejak kontroversi UU Cipta Kerja terangkum

FOTO BERITA NU ONLINE

21:01 13,1KB/d 4G 73

nu.or.id/nasional/hari- + 2

nuonline

Jejak kontroversi UU Cipta Kerja terangkum dalam artikel *NU Online* berjudul **Tuai Penolakan tapi Tetap Disahkan, Ini Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja.**

ad

Sejumlah pasal di dalam UU Cipta Kerja juga menjadi sorotan bagi kaum buruh. Utamanya pada pasal 64-66 tentang pekerja alih daya atau outsourcing yang dinilai tidak jelas. Aturan ini dianggap akan menjadi ketentuan umum pemberian kerja di Indonesia dalam segala jenis pekerjaan.

Soal status pekerja alih daya ini sebenarnya sudah berjalan baik lewat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur pekerja alih daya yang hanya berlaku

FOTO BERITA NU ONLINE

21:01 0,3KB/d 73

nu.or.id/nasional/hari-

nuonline

Soal status pekerja alih daya ini sebenarnya sudah berjalan baik lewat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur pekerja alih daya yang hanya berlaku untuk lima jenis pekerjaan seperti sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa migas pertambangan.

Kemudian ada pasal 79 dan pasal 84 mengenai pemberian cuti panjang yang tidak lagi menjadi kewajiban perusahaan. Pada pasal itu, perusahaan hanya memberikan beberapa jenis cuti seperti tahunan, cuti istirahat antar jam kerja, dan libur mingguan.

Masalah-masalah Permenaker 5/2023

Salah satu yang disorot Konfederasi Sarbumusi adalah karena melalui Permenaker ini, upah buruh di lima industri padat karya berorientasi ekspor dimungkinkan dipotong hingga 25 persen. Lima industri tersebut adalah industri tekstil dan pakaian jadi; industri alas kaki; industri kulit dan barang kulit; industri furnitur; dan industri mainan anak.

Pemotongan upah buruh itu dimungkinkan apabila perusahaan industri padat karya

FOTO BERITA NU ONLINE

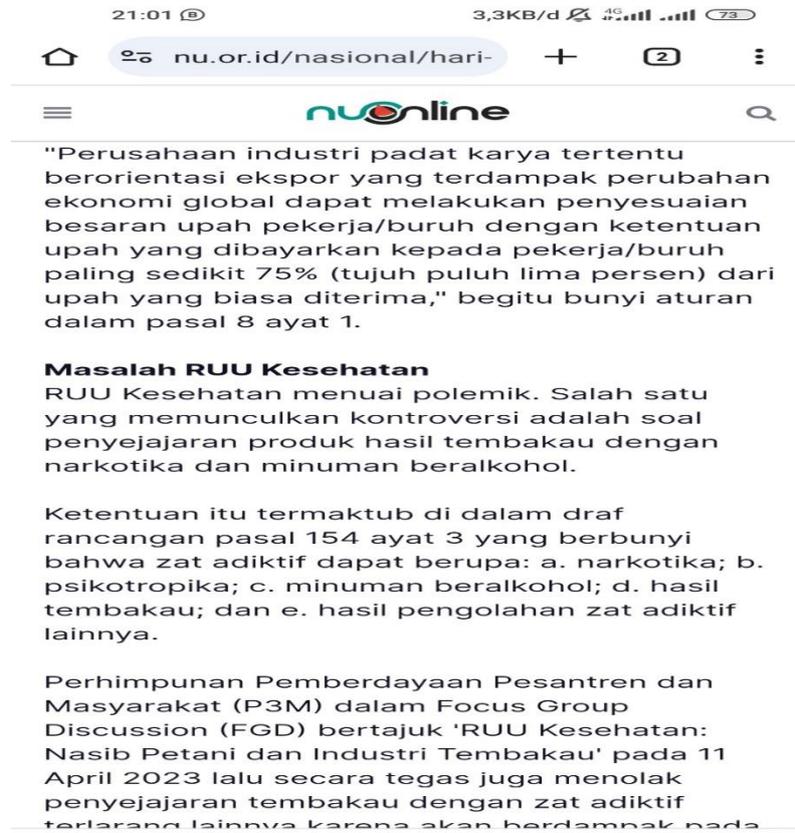


FOTO BERITA NU ONLINE

21:01 9,6KB/d 4G+ 73

nu.or.id/nasional/hari- + 2

nuonline

Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'RUU Kesehatan: Nasib Petani dan Industri Tembakau' pada 11 April 2023 lalu secara tegas juga menolak penyejajaran tembakau dengan zat adiktif terlarang lainnya karena akan berdampak pada kehidupan perekonomian petani tembakau di berbagai daerah.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Fathoni Ahmad

ad

Editor: **Fathoni Ahmad**
Penulis: **Aru Lego Triono**

Taas

FOTO BERITA NU ONLINE

Gambar 1.3 Foto Berita Kompas Tv Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Resmi Dicabut Diganti Dengan Perppu No. 2 tahun 2022





Penulis : **Ikbal Maulana**

JAKARTA, KOMPAS.TV - Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit.

Perppu No 2 tahun 2022 ini dinyatakan resmi diberlakukan sedari tanggal diundangkan yakni tanggal 30 Desember 2022.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (**Kemnaker**), Indah Anggoro Putri dalam kesempatannya menjadi narasumber terkait sosialisasi Perppu No 2 tahun 2022 secara daring, pada Jumat (6/1/2023).

“Dengan terbitnya **perppu cipta kerja** ini maka perppu cipta kerja mengubah ya, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam empat

FOTO BERITA KOMPAS TV



“Pertama yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kedua Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang SJSN atau sistem jaminan sosial nasional, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 perlindungan pekerja migran Indonesia,” tambahnya.

FOTO BERITA KOMPAS TV



Namun, Ida menekankan walaupun **UU Cipta Kerja** resmi dicabut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perppu.

Video Editor: Firmansyah

Pasang Iklan
Pasang Iklan



FOTO BERITA KOMPAS TV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ridho Rama Biswara lahir pada tanggal 19 April 2000 di Metro dari pasangan bapak Agus dan Ibu Sri. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 6 Metro Utara tahun 2012 dilanjutkan dengan SMPIT Al Qudwah dan SMK Muhammadiyah 1 Metro lulus tahun 2019 dan

sekarang penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan program studi Komunikasi dan penyiaran Islam dimulai tahun 2019 hingga saat ini tahun 2023.